

## PAK OGAH DAN KEGAGALAN REPRESENTASI POLITIK KAUM PINGGIRAN DI KOTA YOGYAKARTA

**Asmara Adhi**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Korespondensi Penulis: adhiasmara97@gmail.com

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to describe Pak Ogah as a marginal group in fighting for their rights, the failure of representation and what obstacles are faced in handling and fostering Pak Ogah. This research is a qualitative descriptive field research, using an ethnographic approach, the research location is in Yogyakarta, the informant selection technique is carried out purposively with 7 informant data, the data collection techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. And data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. And the validity of the data using credibility. The conclusion in this study is that there are no technical matters that regulate the prohibition of Pak Ogah, how to provide sanctions and guidance, as well as other processes that must be carried out after controlling Pak Ogah become obstacles for Satpol PP and social services in increasing the effectiveness of controlling and creating a program about Pak Ogah's actions on the highway. Because the focus of social services is still on the homeless, beggars and neglected children and will deal with reports from the public. At first, Pak Ogah presence took to the streets to avoid traffic jams. But in reality, often their presence actually manages to create a long traffic jam. On a number of roads, official signs have been installed, such as on a return route, making their existence less useful. And there is still a lot of crime and fighting over land at the crossroads, making Pak Ogahs have to give some money for their safety at work. Furthermore, Pak Ogah social, economic and political rights have not been fulfilled, such as public access, education, health and basic needs for clothing and food. The recommendation for the transportation service is to make Pak Ogah a SUPELTAS (Traffic Regulating Volunteer) so that Pak Ogah no longer asks for incentives from motorists because he has been fostered, trained and empowered by the transportation service.*

**Keywords:** *Pak Ogah, Marginal People, Public Access and Failure of Representation*

**ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pak ogah sebagai kaum pinggiran/marginal dalam memperjuangkan hak-haknya, kegagalan representasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan serta pembinaan Pak Ogah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, menggunakan pendekatan etnografi, lokasi penelitian di Yogyakarta, Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan data informan 7 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara mendalam dan Dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta Keabsahan data menggunakan credibility Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah menertibkan Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP beserta dinas sosial dalam meningkatkan efektivitas penertiban serta menciptakan program tentang aksi Pak Ogah di jalan raya. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar dan akan menangani apabila ada laporan dari masyarakat. Pada awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka membuat kemacetan Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik, membuat keberadaan mereka kurang bermanfaat. Dan masih banyaknya terjadi Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para-Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Selanjutnya belum terpenuhinya hak-hak seperti hak sosial, ekonomi serta politik Pak Ogah, seperti akses publik, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar sandang dan pangan. Rekomendasi untuk dinas perhubungan untuk menjadikan Pak Ogah sebagai SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) sehingga Pak Ogah tidak lagi meminta insentif dari pemedara karena sudah dibina, dilatih serta diberdayakan oleh dinas perhubungan.

**Kata Kunci:** Pak Ogah; Kaum Marginal; Akses Publik; Kegagalan Representasi;

## PENDAHULUAN

Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Proses globalisasi telah melahirkan urbanisasi baru di kota Yogyakarta. Urbanisasi tidak lagi dipahami detasnya arus migrasi ke pusat kota, melainkan justru arus migrasi menyebar ke pinggiran kota. Bila pada abad ke-20 gejala urbanisasi ditandai dengan gerakan menyerupai efek gaya sentripetal, maka abad ke-21 gejala urbanisasi digambarkan menyerupai gaya sentrifugal yang melenting ke luar. Sebagai kota pariwisata, kota pelajar, kota budaya dan kota historis Yogyakarta dikunjungi oleh berbagai masyarakat kelas atas, menengah dan bawah. Arus penduduk yang datang dan pergi dalam wilayah kota Yogyakarta untuk tujuan pariwisata dan pendidikan memberikan corak perkembangan kota secara khas, yaitu arus penduduk bergerak ke arah kawasan pusat pariwisata dan pendidikan.

Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat urbanisasi berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, dan bertambahnya pemukiman kumuh. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu bagi sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik, maupun secara sosial. Dengan begitu, urbanisasi dapat dilihat dengan lebih jelas juga dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan di kota. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan upah, dan perkembangan kesempatan kerja adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi adanya urbanisasi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan perkapita dan pendapatan total dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan struktur ekonomi di kota. Besarnya jumlah penduduk dapat berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluarannya sehingga akan menyebabkan penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Kaum marginal merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Kata-kata marginal biasanya bagi masyarakat identik dengan perkumpulan orang-orang yang kumuh, tidak tertib, dan bahkan tidak berpendidikan. Mereka layaknya sekelompok manusia yang „terinfeksi“ virus berbahaya yang dapat merusak, inilah sebuah pemikiran mengenai kaum marginal. Kemiskinan juga membuat suatu kaum dimarginalkan, kesulitan ekonomi, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tinggal di tempat kumuh, putus sekolah juga termasuk ke dalam kaum yang digolongkan marginal atau pinggiran. (Yufan, 2012). Kemiskinan suatu hal yang terjadi di semua negara baik negara berkembang dan negara maju salah satunya di negara Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Meskipun pemerintah telah banyak melaksanakan program untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY (BPS) hasil Susenas Maret 2020, Garis kemiskinan di Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta adalah Rp 463.479 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut meningkat 3,11 persen dari kondisi September 2019 yang besarnya Rp 449.485 per kapita per bulan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sebanyak 475,72 ribu orang atau 12,28 persen terhadap total penduduknya. Bisa di lihat Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 34,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019, yang jumlahnya mencapai 440,89 ribu

orang. Pada September 2020 jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sebanyak 503,14 ribu orang. Sedangkan jika dibandingkan Maret 2020, terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 27,4 ribu penduduk. Sementara itu, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta meningkat sebesar 0,52 poin persen menjadi 12,80 persen. Penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 27,1 ribu orang menjadi 353,21 ribu orang. Akan tetapi penduduk miskin di wilayah perdesaan hanya bertambah sebanyak 0,3 ribu orang menjadi 149,93 ribu orang.

Dengan tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Sehingga kemudian di gelutilah profesi pengatur lalu lintas yang tak resmi yang biasa akrab dengan sapaan “Pak Ogah” yang berdiri di sejumlah titik persimpangan jalan yang bertugas membantu mengatur lalu lintas kendaraan yang hendak membelokkan kendaraannya di persimpangan atau perputaran arah. Pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. “Pak Ogah” merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapat imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan, tujuan dari “pak ogah” ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarkan motif ekonomi semata (Suhardyanto, 2015:3). Istilah Pak Ogah diambil dari karakter kartun si unyil yang selalu meminta imbalan dan selalu berkata “cepek dulu dong”. Pak Ogah jalanan meminta imbalan setelah ia menyebrangkan kendaraan, baik motor maupun mobil. Sehingga sebutan ini melekat pada mereka yang mengandalkan uang receh dari pengguna kendaraan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Lokasi penelitian pada tesis ini adalah di Kota Yogyakarta. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pak Ogah dan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta, kehadiran pak ogah sebagai Representasi kaum marjinal yang menjadi korban kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini yang akan menjadi sampel adalah Dinas Sosial, Dinas Satpol PP, dan 5 orang Pak Ogah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keajegan pengamat serta pengecekan anggota.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Sosial Pak Ogah Sebagai Representasi Politik Kaum Pinggiran**

Dalam keadaan dimana hak-hak asasi dari seseorang terancam oleh resiko yang merupakan tanggungjawab penguasa politik, maka negara memiliki kewajiban utama untuk bertindak. Negara harus memastikan bahwa kesempatan hidup masyarakat yang terkena resiko tersebut tidaklah inferior dibandingkan dengan warga negara yang tidak terancam oleh resiko yang sama. Negara hadir menawarkan perlindungan sosial terhadap kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi dasar warganya, menjamin kesempatan pendidikan yang sama, untuk mendapatkan keterampilan, keamanan sosial melindungi masyarakat yang memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat, dan pelayanan kesehatan harus memiliki akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun fasilitas kesehatan tentu harus menjamin mutu layanan kesehatan yang ada.

Dinas Sosial sudah berusaha untuk memberantas kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta terlihat dari beberapa program yang sudah dilaksanakan seperti salah satunya kelompok usaha bersama dan

program keluarga harapan serta melakukan pelatihan kepada masyarakat seperti agar masyarakat mampu memiliki keahlian dan tentunya dapat mengurangi kemiskinan pelatihan kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelatihan untuk wanita rentan ekonomi sosial serta pelatihan untuk warga yang hidup di jalan, serta memberi penanggulangan kemiskinan melalui kelompok usaha Bersama. Kelompok usaha Bersama sendiri terdiri dari 10 anggota keluarga. serta dinas sosial juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak serta melibatkan warga dalam menangani kemiskinan. Tetapi untuk saat ini dinas sosial masih berfokus kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, fakir miskin, dan lansia, biasanya kita menangani yang gelandangan dan pengemis, untuk pak ogah sendiri belum termasuk ranahnya dinas sosial.

Terbatasnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh bapak Gandung membuat beliau mencari jalan pintas untuk mencari uang dengan mudah. Akhirnya beliau memutuskan untuk menekuni profesi sebagai pak ogah yang tentu tidak perlu memerlukan keahlian khusus. Sedangkan untuk penghasilan beliau sendiri Rp. 1.500.000. sampai dengan Rp. 3.000.000. Tentu hal ini bukan hal penghasilan yang kecil, sedangkan untuk bantuan atau pelatihan dari pemerintah tidak pernah beliau rasakan sama sekali, beliau membiayai Pendidikan anaknya sendiri. Sedangkan untuk kesehatan beliau memiliki bpjs kesehatan, sehingga beliau sedikit terbantu untuk urusan kesehatan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tugi Pangesthi biasa dipanggil bapak tugi, beliau sebelum menjadi Pak Ogah bekerja sebagai tukang tambal ban, tetapi karena tidak menghasilkan dan banyak saingan bengkel yang lebih besar makanya beliau memutuskan untuk tutup bengkel dan memilih bekerja sebagai Pak Ogah, karena bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa memerlukan keahlian khusus. Beliau memiliki 3 orang anak yang 1 orang sudah bekerja dan 2 orang masih sekolah. Istri beliau bekerja sebagai penjual gorengan.

Adanya virus corona menyebabkan beliau kehilangan pekerjaan dan mengharuskan beliau mencari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian serta skill khusus. Penghasilan beliau terbilang cukup besar kisaran Rp. 600.000. sampai dengan Rp. 800. 000. Perbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya mobilitas kendaraan yang melintas atau yang berbelok arah. Serta dengan masih banyaknya terjadi premanitas sehingga beliau harus memberikan setoran setiap bulan kepada preman agar beliau bekerja dengan aman.

1. Awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tapi pada kenyataannya, seringkali keberadaan mereka malah berhasil bikin macet Panjang.

Di sepanjang cabang jalan yang bermuara ke pertigaan atau perempatan di mana Pak Ogah beraksi, justru terjadi kemacetan parah. Karena setiap kendaraan harus antri buat lewat, atau Pak Ogahnya kurang bisa bersikap tegas pada kendaraan yang ngotot lewat padahal bukan gilirannya, serta kurangnya keahlian dari pak ogah karena tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang pengaturan lalu lintas sehingga berakibat tidak semua bisa patuh sama mereka. Coba kalau polisi yang turun untuk mengatur lalu lintas karena memang menjadi tugas mereka dan mempunyai keahlian di bidangnya membuat pengendara pasti pada takut dan taat.

Berbagai cara para-Pak Ogah lakukan untuk menarik simpati pengguna jalan untuk memberi mereka uang. Selain menggunakan galon sebagai tutup kepala untuk menghindari atau melindungi diri dari tertularnya Covid-19, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Bapak Ali Akbar Pak Ogah kreatif yang menutupi wajahnya dengan galon sembari mengatur lalu lintas di Jalan Taman Siswa. Selain itu kebanyakan para-Pak Ogah hanya melakukan cara dengan mengucapkan terima kasih atau selalu melemparkan senyuman kepada para pengendara agar menarik perhatian para pengendara untuk memberi mereka uang. Sederhana memang, namun justru hal itu menjadi hiburan tersendiri bagi orang

yang melihatnya. Terutama saat sedang penat datang, para-Pak Ogah ini lumayan buat mencairkan suasana yang sedang tegang. Jadi, tidak selamanya mereka ini selalu lekat dengan stigma buruk. Tugas seorang Pak Ogah ini terkadang bukan hal yang main-main. Perilaku pengendara yang ingin saling duluan, kadang malah membuat lalu lintas semakin semrawut. Para “Pak ogah” sebutan lain, sebagai bagian masyarakat yang menggantikan tugas para polisi secara sementara. Memang ada beberapa dari mereka malah memberikan citra buruk padanya.

2. Di sejumlah ruas jalan yang ada Pak Ogahnya, kadang juga ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik. Sehingga keberadaan mereka malah kurang berfaedah atau bermanfaat.

Diliriknya satu profesi ini, yakni juru putar atau akrab disapa dengan “Pak Ogah”. Profesi ini dilirik sebagian orang yang pengangguran, putus sekolah atau sifatnya hanya situasional, karena tidak menuntut ijazah dan pendidikan yang tinggi untuk melakukannya, apabila telah memiliki semprian dengan mengenakan rompi seperti gambar di samping, dan berdiri di sudut atau tikungan jalan dengan maksud membantu pengendara roda empat untuk memutar atau membelokkan kendaraannya, maka itu disebut sebagai Pak Ogah atau tukang juru putar. Biasanya kita akan menjumpai si Pak Ogah ini di setiap putaran arah jalan raya dengan maksud membantu pengendara mobil ataupun kendaraan lainnya untuk memutar atau membelokkan kendaraan tersebut yang tentunya jasa mereka mengharap untuk diberi upah dengan uang pada umumnya. Situasi ini menjadi suatu kebiasaan yang bukan hanya sistem atau cara kerja Pak Ogah saja yang terus berlanjut, tetapi jumlah upah Pak Ogah juga ikut berdasarkan kebiasaan dari perkembangan sampai di kisaran mulai dari Rp 1.000, Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Akan tetapi semua kembali kepada pengendara kendaraan atau masyarakat yang melihat dari sudut pandangnya masing-masing, walaupun asas kemanfaatan ada dalam cara kerja dari Pak Ogah tersebut untuk diberikan upah atau paling tidak kata terima kasih atau membunyikan klakson kendaraan sebagai salah satu cara berterima kasih berdasarkan kebiasaan yang ada.

Para Pak Ogah tau kalau ada rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, tetapi mereka beralasan untuk membantu pengendara dan mengurangi kemacetan yang terjadi. Dengan banyaknya mobilitas pengendara yang lalu Lalang membuat kehadiran Pak Ogah dibutuhkan para pengendara yang mau berputar arah karena kebanyakan pengendara yang tidak mau mengalah dan hal itu menyulitkan para pengendara untuk berputar arah dan menyebabkan kemacetan. Pemasangan rambu lalu lintas di jalanan bertujuan agar para pengguna jalan selalu tertib. Selain itu pemasangan rambu lalu lintas juga dimaksudkan agar pemakai jalan juga merasa aman dalam berkendara. Namun begitu, nyatanya masih banyak pengendara yang menganggap rambu lalu lintas cuma sebagai pajangan. Apalagi kalau kita lihat di Yogyakarta sudah banyak sekali rambu-rambu yang terpasang. Sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh adanya rambu-rambu lalu lintas itu sudah mewakili negara. Rambu-rambu lalu lintas itu mewakili polisi agar tidak melakukan pelanggaran. Jangan ada rambu, harus ada polisi, berapa polisi yang dibutuhkan kalau seperti itu. Rambu itu perintah undang-undang. petugas kepolisian tidak bisa ditempatkan di setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tetapi hal ini justru dimanfaatkan oleh para Pak Ogah untuk mendapatkan uang dengan membantu para pengendara berputar arah.

3. Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat.

masih banyak sekali terjadinya premanisme di Yogyakarta, hal ini dapat kita lihat dari hampir semua para Pak Ogah harus membayar setoran mulai dari perminggu atau perbulan. Muncul preman-preman di daerah pinggiran banyak ini membuat para Pak Ogah mereka harus membagi penghasilan mereka ke pada ketua preman yang ada di daerah tersebut supaya mereka mendapatkan perlindungan dalam bekerja, serta kalau terjadi perebutan wilayah akan terjadi keributan karena tidak ada yang mau mengalah untuk memperebutkan lahan pencaharian mereka. Para Pak Ogah pun tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa karena sistemnya para preman adalah berkelompok, dan kebanyakan para Pak Ogah lebih baik menghindari permasalahan dengan para preman. Lebih baik mereka membayar untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja serta mempertahankan lahan pencarian mereka.

Tindakan atau praktek preman dalam melakukan pungutan liar tersebut, secara tidak langsung telah melakukan perbuatan penipuan ringan dan penggelapan ringan kepada masyarakat dan daerah dengan cara menipu identitas selaku tukang parkir resmi dan mengambil dana-dana hasil pungutan liar, dana hasil pungutan polisi-Pak Ogah, dan dana hasil pungutan dari lapak-lapak kaki lima di pasar, yang kesemuanya seharusnya disetorkan kepada pemerintah sebagai dana kas daerah, namun dalam kenyataannya digunakan untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu, dengan alasan bahwa hasil pungutan tersebut nilainya rata-rata berkisar antara Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 70.000. Polisi juga tidak bisa melarang ataupun mengamankan mereka walaupun banyak terjadi pungutan liar dan termasuk premanisme. Apabila ditangkap maka sifatnya pembinaan saja, tidak bisa ditahan 1x24 jam, dikarenakan karena mereka itu illegal, serta minimnya barang bukti.

## **Hak Ekonomi Meliputi Hak Memperoleh Pekerjaan, Atas Pembayaran Yang Adil, Atas Kondisi Kerja Yang Layak**

Kebanyakan orang memang memandang pak ogah dengan banyak prasangka di belakang kepala. Peneliti awalnya juga memandang mereka semata-mata dari kaca mata diri, dari keadaan dan kondisi peneliti, sama sekali tidak mencoba memahami mereka dari sudut pandang mereka. Memang mudah untuk menghakimi mereka dari sudut pandang orang yang menaiki mobil yang nyaman, tinggal di rumah yang nyaman dengan harta yang dimiliki, dan pekerjaan baik yang dimiliki. Mudah sekali. Dapatkah kita memandang mereka dari keadaan mereka, Dapatkah kita membayangkan posisi dan keadaan mereka, Mereka memandang hidup ini tanpa dapat melihat adanya harapan untuk hidup layak seperti kita. Mereka saat ini harus tinggal di rumah kecil bersama dengan sekian banyak saudara, pendapatan rumah tangga pas-pasan, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Dimarahi orang di sana-sini. Dihina orang di sana-sini. Dipandang rendah di sana-sini.

### **1. Upaya Melengkapi Pak Ogah dengan Alat Pelindung Diri**

Dalam melakukan tugas sebagai pengatur lalu lintas para Pak Ogah selain harus memiliki pengetahuan dasar tentang pengaturan lalu lintas dan juga disarankan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Secara sederhana yang dimaksud alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya bahaya atau kecelakaan kerja. Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengaman tempat, peralatan, dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Namun, terkadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri (personal protective devices).

Selain alat pelindung diri, untuk menunjang kinerja para Pak Ogah di lapangan menggunakan

pakaian seragam dengan identitas sebagai penanda. Beberapa Pak Ogah malah dengan sukarela melengkapi alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan dan menciptakan keselamatan bagi diri saat melakukan tugas sebagai pengatur lalu lintas. Alat alat yang dimaksud yakni berupa: masker pelindung, rompi, lampu gatur lalin, topi, dan peluit saat mengatur lalu lintas

## 2. Pengetahuan Mengatur Lalu Lintas

Mayoritas metode yang dipakai para pak ogah dalam mengatur lalu lintas ialah mendahulukan pengemudi atau pengguna jalan yang memberikan uang sehingga tak jarang justru membuat macet dan mempersampingkan hak pengguna jalan lain. Dalam pengaturan lalu lintas selalu dibutuhkan kemampuan dalam mengatur lalu lintas. Kemampuan dalam berlalu lintas haruslah diimbangi dalam dasar-dasar yang digunakan untuk dilakukan di jalan-jalan. Misalnya, dalam instansi pemerintahan seperti Kepolisian dan Satpol PP diberi pengetahuan dan cara-cara yang benar dalam hal mengatur lalu lintas sebelum di tugas kan. Cara-cara melewati kendaraan pun beragam-ragam. Seperti melewati 4 mobil terlebih dahulu lalu membuka jalan di sisi lain nya yang sebelum nya mengantri untuk memperkirakan 10-20 detik tiap sisi jalan untuk melewati kendaraan yang ingin lewat.

mereka yang menjadi Pak Ogah adalah mereka yang mengetahui dalam hal mengatur lalu lintas dengan belajar sendiri atau Otodidak. Mereka belajar menjadi Pak Ogah dengan melihat ketika polisi atau petugas dari Dinas Perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas. Dengan cara mengamati petugas itu lah sebagai dasar awal untuk mengatur lalu lintas. Gerakan tangan yang harus digunakan misalnya tanda untuk menahan pengendara dari satu sisi agar sisi lain bisa teratur bergantian berjalan. Fungsi Pak Ogah sendiri adalah bisa dikatakan sebagai pengganti dari rambu-rambu lalu lintas di simpang Jalan yang tidak ada rambu lalu lintas nya. Hal ini juga membuat kemacetan yang cukup parah di jalan tersebut diperparah lagi kurang tertibnya pengendara kendaraan dalam berlalu lintas di jalanan. Pengetahuan mengatur lalu lintas muncul ketika disaat sedang mengatur lalu lintas di lokasi untuk beraksi menjadi Pak Ogah hal ini harus disesuaikan ketika saat mengatur. merasa senang dengan kehadiran mereka maka diberi imbalan yang sesuai dengan keikhlasan pengendara.

Dari paparan di atas menurut peneliti, yang ideal itu, di setiap tikungan yang padat dan berpotensi membuat kemacetan sebaiknya ada polisi. Atau jika tidak, dibutuhkan dua orang Pak Ogah. Pak Ogah yang 1 fokus tugasnya adalah membantu mengatur lalu lintas, harus berdiri di sisi jauh dari pengemudi dan tidak perlu memikirkan uang. Dan pak Ogah yang ke 2 berdiri di sisi dekat pengemudi tugasnya menampung uang dari pengemudi atas kerja yang dilakukan oleh pak Ogah yang ke 1. Pada akhir kegiatan, uang itu harus dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan (sebaiknya Pak Ogah yang ke 1 yang menerima bagian yang lebih banyak karena resikonya lebih tinggi dan pekerjaannya lebih sulit, dibanding dengan yang hanya berdiri, mengangkat tangan dan meminta uang).

## **Hak Politik Seperti Hak Untuk Membentuk Partai Politik dan Untuk Memilih.**

Hal yang paling penting adalah membangun masyarakat sipil yang aktif. Hal ini tidak hanya akan menawarkan kesempatan kepada warga negara untuk meningkatkan kepentingan mereka dan mempraktekkan pengaruh demokratisasi dalam prosedur representatif; namun hal tersebut juga memberikan kesempatan adanya dukungan sosial tambahan. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil mendukung sosialisasi politik warga negara, dan memiliki fungsi mengarahkan di masyarakat luas. Hal tersebut di atas merupakan kondisi esensial yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses integrasi politik yang dibutuhkan oleh demokrasi sosial. Ranah publik yang berfungsi tidak hanya memberikan informasi dan argumentasi bagi individu; namun lebih jauh lagi hal tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meraih kesepakatan mengenai nilai-nilai yang mempengaruhi

kesejahteraan mereka bersama, contohnya masalah kebijakan pendidikan, ekonomi, dan politik.

### 3. Kajian Yuridis Terhadap Pak Ogah

Di zaman yang semakin maju ini banyak penemuan teknologi baru yang canggih dan sangat bermanfaat. Banyak orang berlomba untuk mempelajarinya dan bersaing agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Serta para Pak Ogah tidak mengetahui kalau pekerjaan mereka adalah Ilegal, menurut mereka selagi belum ada pemberitahuan atau Razia dari petugas maka mereka akan tetap bekerja sebagai Pak Ogah, karena hasilnya cukup menjanjikan untuk mereka, kalau di lihat dari sisi legalitas hukumnya tidak ada hak bagi para Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas, tetapi demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Dan apabila terjadi sebuah kecekalan dalam bertugas, maka para anggota Pak Ogah mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian. Perlindungan hukum dalam hal ini berupa bantuan dalam proses penyelesaian masalah apabila dalam bertugas para anggota Pak Ogah terjadi sebuah kecelakaan. Masyarakat kecil seperti Pak Ogah pun tidak dapat berbuat apa-apa, mereka menjalani kerasnya hidup dan hanya memikirkan kelangsungan hidup tanpa memikirkan niat untuk bersekolah, membeli obat jika sakit yang ada hanya apakah besok masih bisa makan.

### 4. Kemiskinan, Layanan Akses Publik serta kegagalan representasi

Inovasi merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada akses publik Inovasi tidaklah harus selalu berkaitan dengan penciptaan suatu produk yang canggih, tetapi lebih kepada bagaimana membuat suatu pekerjaan itu lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih murah serta dapat menjangkau masyarakat miskin. Pelayanan kepada akses publik pun mestinya diciptakan supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, bahkan lebih murah pula, serta tetap sasaran yang menjadikan masyarakat miskin sebagai subyek. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan inovasi pelayanan akses public yang perlu dilakukan.

Kegagalan Representasi dari Dewan Pimpinan Rakyat sebagai wakil rakyat miskin. DPR Merupakan seorang wakil rakyat yang duduk di Kursi Parlemen sebagai penyambung lidah rakyat atas segala keluh kesah rakyat kepada Pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Namun, akhirnya ini DPR sering kali bermakna negatif dilingkungan masyarakat. Terlebih DPR seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah yang sebetulnya itu baik untuk masyarakat namun juga ada mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Soal fungsi di roda jalannya pemerintahan, DPR juga berfungsi sebagai control dan check and balance di Parlemen. Misalnya, Pemerintah akan mengadakan suatu program kesejahteraan rakyat. Dari program tersebut tentunya, DPR menanyakan kepada Pemerintah tujuan dan fungsi diadakannya program atau kebijakan tersebut dan bagaimana alokasi dananya.

Rendahnya Pendidikan para Pak Ogah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan untuk dimasuki. Dalam bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada, taraf pendidikan juga menentukan. Taraf Pendidikan rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Di zaman yang semakin maju ini banyak penemuan teknologi baru yang canggih dan sangat bermanfaat. Banyak orang berlomba untuk mempelajarinya dan bersaing agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi tidak bagi para Pak Ogah, Tidak ada pilihan lain bagi para Pak Ogah untuk mendapatkan uang dengan mudah selain bekerja sebagai Pak Ogah.

Orang-orang seperti para Pak Ogah yang pekerjaannya kurang layak, dan memiliki resiko yang besar bagi keselamatan mereka atau hasil dari kerjanya hanya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari mau tidak mau bertahan dalam kondisi lingkungan yang kumuh dan tempat tinggal yang kurang layak.

Sungguh fenomena yang sangat berbeda bagai bumi dan langit. Begitu banyak masyarakat yang kurang mampu dan miskin. Adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan calon pekerja, lapangan pekerjaan yang sulit yang menjadikan banyak timbulnya pengangguran sehingga timbul kemiskinan. Masalah yang lain yaitu kebutuhan pokok yang diberikan oleh pemerintah seperti pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan. Banyak berita yang menyatakan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, layanan kesehatan dan yang lainnya malah di salah gunakan oleh pemerintah. Anggaran yang begitu banyak yang merupakan hak rakyat malah untuk membuncitkan perut para jajaran pemerintah. Masyarakat kecil seperti para Pak Ogah pun tidak dapat berbuat apa-apa, mereka menjalani kerasnya hidup dan hanya memikirkan kelangsungan hidup tanpa memikirkan niat untuk bersekolah, membeli obat jika sakit yang ada dipikiran mereka hanya apakah besok masih bisa makan.

## **A. Kendala-Kendala dalam Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Pengendara yang Memberi Uang Kepada Pak Ogah**

Adanya pergeseran nilai yang pada awalnya berdasarkan tolong menolong berubah menjadi sumber pendapat yang menjanjikan sebagai Pak Ogah karena adanya penghasilan tetap dan cukup untuk keperluan sehari-hari. Dengan melihat kesadaran diri seperti umur yang sudah lanjut dan peluang dalam mendapatkan pekerjaan yang lain sangatlah minim ditambah kurangnya skill dan pengalaman yang dimiliki membuat tidak tahu harus bekerja apa. Maka dengan keadaan terdesak untuk menjadi “Pak Ogah” yang mengharapkan pemberian dari pengendara yang melintas. Jenis kendaraan yang sering memberi adalah mobil. Kendaraan yang cukup memakan banyak jalan tidak bisa menyelip di kemacetan. Maka disaat itu pula peranan Pak Ogah dibutuhkan agar mampu memberi jalan. Tanda yang diberikan jika ingin belok dengan menghidupkan lampu ke kiri atau kanan. Ini terlihat ketika ada ingin membelok ke sisi jalan lain, secara inisiatif langsung mengatur jalan untuk kendaraan tersebut. Dan apabila sudah diberi jalan Pak Ogah memposisikan diri di sebelah kanan mobil, guna memudahkan dalam menerima imbalan yang diberikan. Diberi imbalan maka pengendara cukup membuka sebagian kaca samping dan sambil melintas diberi uang tanpa ditentukan. Dalam semenit ada lima sampai sepuluh mobil yang melintas.

### **2. Tidak Adanya Peraturan Khusus Terkait Pak Ogah di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Tidak adanya hal-hal secara teknis yang mengatur tentang pelanggaran Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah penertiban Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP dalam meningkatkan efektivitas penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya, karena tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang Pak Ogah membuat terbatasnya ruang gerak satpol PP untuk menciptakan program dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya. Serta Salah satu kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, selalu mengkoordinasikan setiap penertiban yang dilakukan kepada Dinas Sosial jika memang diperlukan untuk dilakukan pembinaan para Pak Ogah oleh Dinas Sosial sebagai lembaga penjamin kesejahteraan Sosial, yang mana Dinas Sosial memiliki program terkait pembinaan anak jalanan. Sehingga kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera serta ilmu yang bermanfaat yang bisa diperoleh oleh Pak Ogah, agar dapat mencari kerja ataupun membuka usaha sendiri dan meninggalkan pekerjaannya di jalanan sebagai Pak Ogah yang selain melanggar aturan juga membahayakan dirinya sendiri.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terkait pak ogah dan kegagalan representasi politik kaum pinggiran di kota Yogyakarta maka peneliti mengambil kesimpulan: Pak ogah sebagai Representasi Kaum Marginal Memperjuangkan Hak- Hak Sebagai Warga Kota Yogyakarta. Tanggungjawab sebagai kepala keluarga menjadi beban untuk bisa bekerja mencari uang untuk keluarga. Banyak nya biaya yang perlu disiapkan seperti kebutuhan dapur, dan biaya rokok. Untuk akses kesehatan sendiri kebanyakan para pak ogah memiliki BPJS Kesehatan. Dalam Pendidikan juga para Pak Ogah terbantu dengan adanya beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yaitu kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah. Karena memang awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka malah berhasil bikin macet Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik. Sehingga keberadaan mereka kurang bermanfaat. Serta masih banyaknya terjadi Premanisme dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para-Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Hak ekonomi meliputi hak memperoleh pekerjaan, atas pembayaran yang adil, dan kondisi kerja yang layak, Kebanyakan orang memandang pak ogah dengan banyak prasangka di belakang kepala. sama sekali tidak mencoba memahami mereka dari sudut pandang mereka. Memang mudah untuk menghakimi mereka dari sudut pandang orang yang menaiki mobil yang nyaman, tinggal di rumah yang nyaman dengan harta yang dimiliki. Mereka saat ini harus tinggal di rumah dengan pendapatan rumah tangga pas-pasan, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Dimarahi, serta dipandang hina orang di sana-sini. Para Pak Ogah membeli sendiri alat kelengkapan dalam mengatur lalu lintas serta tidak ada bantuan dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian, mereka membeli alat-alat agar terlihat oleh pengguna jalan, serta lebih banyak yang memberi uang. Selanjutnya untuk Pengetahuan Mengatur Lalu Lintas, para Pak Ogah kebanyakan belajar otodidak dengan melihat polisi yang berjaga tidak ada pelatihan dari pihak kepolisian.

Inovasi merupakan kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada akses publik, tidaklah harus selalu berkaitan dengan penciptaan suatu pelayan yang canggih, tetapi lebih kepada bagaimana membuat suatu pekerjaan itu lebih mudah, lebih cepat, serta dapat menjangkau masyarakat miskin. Para Pak Ogah hanya menginginkan pekerjaan yang layak serta kemudahan dalam hal akses publik. Karena maraknya kemunculan Pak Ogah karena adanya pandemi covid-19 yang membuat mereka terkena dampak terutama masyarakat pinggiran yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya juga masih banyaknya pengendara yang memberikan uang kepada para Pak Ogah sehingga membuat mereka kembali lagi ke jalan dan semakin besar pula penghasilan para Pak Ogah.

Kendala-Kendala dalam Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah penertiban Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP dalam meningkatkan efektivitas penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya, karena tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang Pak Ogah membuat terbatasnya ruang gerak satpol PP untuk menciptakan program dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban aksi Pak Ogah di jalan raya. Untuk dinas sosial pun sama mereka tidak bisa melakukan tindakan khusus terhadap para Pak Ogah karena tidak adanya Perda yang mengatur, mereka hanya akan melakukan pembinaan dan pelatihan kalau ada laporan dari dinas-dinas terkait. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar serta menangani apabila ada laporan dari masyarakat.

## SARAN

1. Pemerintah berkewajiban menjamin hak-hak Pak Ogah, seperti hak sosial mulai dari hadir menawarkan perlindungan sosial terhadap kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi dasar warganya, menjamin kesempatan pendidikan yang sama, melindungi masyarakat yang memiliki potensi terjadinya benturan antar kelompok dalam masyarakat, dan pelayanan kesehatan harus memiliki akses yang seluas-luasnya. Serta hak ekonomi seperti pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, untuk meningkatkan kebebasan, serta hak politik seperti memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meraih kesepakatan mengenai nilai yang mempengaruhi kesejahteraan mereka bersama, terutama masalah kebijakan pendidikan, ekonomi, dan politik.
2. Pemerintah diharapkan segera membuat sebuah kebijakan serta jangan seolah-olah mendiamkan sebuah problem sosial yang belum mencapai puncak ketidakteraturan, penanganan yang cepat akan lebih efektif dan efisien untuk menyelamatkan keadaan dari berbagai permasalahan, baik melalui ketegasan pemerintah untuk menekan satuan pamong praja bekerja sama dengan dinas sosial agar meningkatkan profesionalitas kerja, maupun menyiapkan strategi penangan Pak Ogah beserta kompleksitasnya, baik anggaran kesejahteraan dan pembinaan, serta jika memang dirasa ketertiban perlu untuk diutamakan, dan satuan pamong praja terlalu kewalahan untuk melakukan penertiban hendaknya bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.
3. Masyarakat juga perlu berbenah untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta tidak memberi para-Pak Ogah uang agar mereka tidak kembali ke jalan serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terutama bagi para-Pak Ogah, harus belajar tentang tata cara pengaturan lalu lintas, tidak membedakan pengendara di jalan, serta selalu melengkapi diri dengan alat pelindung agar terhindar dari resiko bahaya di jalan. Kalau memang berinisiatif membantu menertibkan lalu lintas, ketika dijadikan sebagai sarana mencukupi kebutuhan ekonomi, maka tetap harus tetap menjaga ketertiban, dan keamanan di jalan, bahkan profesional juga diperlukan dalam hal pembantuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi zul Ghosyi. 2013. *“Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta.* Data Pdf
- Bachrawi sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8
- Badan Pusat Statistik DIY (BPS) hasil Susenas Maret 2020
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cheyne, Christine, Mike O’Brien and Michael Belgrave. 1998. *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction.* Auckland, Oxford University Press.
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 200.
- Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial.* (Jakarta : Kencana, 2011), 366.
- Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 9-11
- George A. Steiner dan John B. Miner, *Management Policy and Strategy*, Alih Bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 22
- Khoirina, C. (2016). *Motivasi Menjadi Seorang Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS).* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Kurebwa, Jeffrey 2015, A Review Of Hanna Pitkin's (1967) Concept Of Women's Political Representation, International Scientific And Research Publications, Volume 5
- Kuntjoro, Dorodjatun. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Lipset, S. M. (1960). *Political Man: The social bases of politics*. New York: Anchor Books
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota* Cetakan Ke-3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McGillivray, M. (2006). *INEQUALITY, POVERTY AND WELL-BEING* .: United Nation Univercity.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nuri Suseno, *op.cit. representasi politik*. Hlm. 6
- Nursalam, & Akbar, M. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No.2 November*, 224
- Pitkin, H 1967. The concept of representation. Berkeley: University of California Press Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University
- Patmawati, H. D., & Imron, A. (2015). Distribusi Arena Pak Ogah: Studi Mengenai Habitus, Modal, dan Arena pada Praktik Sosial Pak Ogah di Ketintang Selatan. *Paradigma*, 03(02), 1-7
- Rozaki, (2014). Dari representasi simbolik menuju representasi substantif potret representasi konstituensi dan komunikasi politik anggota dewan perwakilan daerah. Yogyakarta : IRE
- Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm. 9-10
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suhardiyanto, May. 2015. Fenomena Pekerja Anak sebagai “Pak Ogah” di Ciputat Tangerang Selatan. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: ALFABETA
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Syahyuti., (2006), 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian (Penjelasan konsep, istilah, teori, dan indikator variabel), Bina Rena Pariwisata , Jakarta
- O'Donnell, Guillermo: Delegative Democracy (Demokrasi Delegatif), dalam: *Journal of Democracy* (5) 1: 55- 70, 1994
- Undang-undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- Junaidy, Kurniawan, Robby. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru (studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008). *Jurnal Jom FISIP*. Vol. 1 No.2

- Khomsiyah, H., & Pierewan, A. C. (2017). Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Student UNY*.
- Sukarno, B. (2016). Efektivitas Komunikasi Nonverbal Supeltas Dalam Mengatur Lalu Lintas di Surakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*
- Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali*. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Putra, A. R., Yasin, F., & Turi, R. (2017). Bentuk Aktivitas Pekerja Anak di Jalan (Studi Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Jalan Prf. Dr. Hamka Kota Padang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Sumatera Barat*.
- Andrisari, Farida Oktaviani . “Implementasi Nilai-Nilai Peduli Sosial Dan Tanggungjawab Pada Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas)” (Undergraduate thesis universitas muhammadiyah surakarta 2016) <https://core.ac.uk/download/pdf/148611515.pdf>
- Aslan, Zul. “Tindakan Rasionalitas Instrumental Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Di Kota Malang (Studi Di Jalan Mertojoyo Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Malang 2016. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33750https://docplayer.info/38100904-Skripsi-tinjauan-sosio-yuridis-tentang-keberadaan-bantuan-polisi-banpol-atau-pak-ogah-di-kota-makassar-studi-kasus-tahun.html>
- Muhammad Ridwan Hidayat, “Eksistensi "Pak Ogah" dalam sistem hukum Indonesia perbandingan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta”. Undergraduate thesis universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin>
- Wahyuni, Asal dan Erlin Mulyadi, “Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta” *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2,1 Juni 2016*. <https://media.neliti.com/media/publications/98129-ID-supeltas-dan-pelican-crossing-ragam-inov.pdf>